

**SEMINAR WISUDA PERIODE I
UNIVERSITAS TERBUKA**

ORASI ILMIAH

**“Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Indonesia
di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”**



**Marsekal TNI (Purn) HERMAN PRAYITNO, S.IP., MM.
Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia**

UT CONVENTION CENTER PONDOK CABE

4 APRIL 2016

KATA PENGANTAR

ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI KUALA LUMPUR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, Orasi Ilmiah Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia di hadapan civitas akademika Universitas Terbuka (UT) khususnya para wisudawan/wati UT periode I tahun 2016 dapat dilaksanakan di Kampus UT Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 4 April 2016. Kesediaan Bapak Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno untuk hadir dan menyampaikan orasi ilmiah di Kampus UT merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan yang sangat baik bagi para calon alumni UT untuk dapat berinteraksi langsung dengan Duta Besar Herman Prayitno yang juga merupakan alumni UT.

Pada kesempatan ini, saya selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno, atas kesediaannya untuk hadir dan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para wisudawan/wati UT.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

Prof. Tian Belawati, Ph.D, Rektor UT beserta segenap jajaran Pimpinan UT yang telah mengundang Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia untuk hadir di Kampus UT.

Home staff KBRI Kuala Lumpur: Ibu Kartika Prawati Rum Surjani, Bapak Judha Nugraha, Bapak Ali Murtado dan Bapak Candra Wiguna Alisufi serta para *local staff* yang telah memberikan dukungan dalam menyiapkan materi orasi ilmiah.

Semoga orasi ilmiah yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada civitas akademika UT khususnya para wisudawan/wati UT periode I tahun 2016, dan sekaligus dapat mempererat jejaring kerjasama UT dengan KBRI Kuala Lumpur.

Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc

KATA SAMBUTAN

DUTA BESAR LBBP RI UNTUK MALAYSIA

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya saya selaku Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia dapat hadir di tengah-tengah civitas akademika UT untuk menyampaikan Orasi Ilmiah berjudul: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Topik orasi ilmiah ini sangat relevan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi penyiapan generasi Indonesia yang unggul.

Wisuda lulusan UT periode I tahun 2016 ini adalah bentuk kontribusi nyata dari UT dalam menyiapkan dan menghasilkan tenaga kerja profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Karena hanya melalui pendidikan di UT, bapak/ibu/saudara semua yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi reguler, dapat mengikuti pendidikan tinggi dengan mutu pendidikan yang berkualitas. Saya adalah alumni UT yang menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Ilmu Politik pada tahun 1996. Sebagai alumni, saya sangat bangga karena UT telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya sehingga sukses meniti karir. Merupakan kehormatan bagi saya berada di tengah-tengah civitas akademika UT pada acara wisuda kali ini untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup kepada saudara semua.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Rektor UT, Prof. Tian Belawati, Ph.D dan jajaran pimpinan UT yang telah mengundang saya hadir disini. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Prof. Dr. Ari Purbayanto yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan orasi ilmiah ini dengan UT dan juga mempersiapkan materi bersama tim *home staff* dan *local staff* KBRI Kuala Lumpur.

Semoga orasi ilmiah ini dapat memberikan manfaat dalam mencerahkan (*enlightenment*) dan membukakan wawasan berpikir global (*global mindset*) kepada civitas akademika UT, khususnya para wisudawan/wati UT periode I tahun 2016 ini.

Terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.

Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, S.IP., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
KATA SAMBUTAN	2
I. PENDAHULUAN	4
II. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	5
Proses Pembentukan MEA	6
III. PERAN STRATEGIS MEA BAGI INDONESIA DAN KAWASAN	13
Kekuatan Ekonomi ASEAN di Tengah Pusaran Krisis Global	13
Integrasi Ekonomi Kawasan sebagai Alat Pendorong Stabilitas Politik	13
Identitas Tunggal	18
IV. PERAN STRATEGIS SDM DI ERA MEA	20
Dari Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif	20
Peningkatan <i>Value-Added</i> dalam <i>Global Value Chains</i>	21
Dari Tenaga Kerja Tidak Terampil Menuju Terampil	22
Studi Komparasi: Kesiapan Malaysia dalam MEA	24
V. INDONESIA DAN MEA: PELUANG, RESIKO DAN TANTANGAN	27
Posisi Ekonomi Indonesia dalam ASEAN	27
VI. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS SDM INDONESIA	34
VII. PENUTUP	39
Daftar Pustaka	40
Riwayat Hidup	42

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai sejak 31 Desember tahun 2015. MEA adalah bentuk dari integrasi ekonomi ASEAN, dimana seluruh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Implementasi MEA ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi ASEAN dan setiap negara secara bersama memperoleh dampak positif terhadap kemajuan ekonomi tersebut. Dengan demikian persaingan yang akan terjadi diantara negara ASEAN seyogianya dipandang sebagai persaingan positif untuk maju bersama dengan saling mengisi berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN.

Dalam menghadapi persaingan di era MEA, masing-masing negara ASEAN berupaya untuk menyiapkan diri. Salah satu aspek penting yang harus disiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga siap dan mampu bersaing untuk merebut pasar kerja di ASEAN. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN dituntut untuk dapat menyiapkan SDM terdidik dan terampil (*educated and skilled labours*), sehingga tidak hanya unggul pada pasar tenaga kerja dalam negeri tetapi juga unggul di negara-negara ASEAN.

Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda UT periode I dengan judul "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN" merupakan topik yang sangat relevan dengan upaya yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia pada saat ini. Dalam orasi ini akan dibahas berbagai aspek yang meliputi: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peran strategis sumber daya manusia di era MEA, posisi Indonesia dalam MEA, dan strategi peningkatan kapasitas SDM Indonesia dalam menghadapi MEA, serta penutup.

II. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Proses Pembentukan MEA

Background dan milestones pembentukan ASEAN

Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang *vibrant*, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. *The Association of South East Asian Nations* (ASEAN) telah menjadi saluran bagi negara anggota untuk mengembangkan perekonomiannya di dalam kondisi yang damai dan stabil selama hampir setengah abad.

Pada era 60-an, penduduk dunia dikhawatirkan dengan bahaya laten terjadinya perang yang melibatkan dua kutub kekuatan politik dan militer dunia. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, telah menumbuhkan *hot spots* di beberapa negara di dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, dampak perang dingin telah menimbulkan pecahnya perang saudara di Vietnam, dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Menghadapi kondisi yang tidak mendukung bagi kawasan, Para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara berupaya untuk mengakhiri ketidakstabilan politik dan keamanan yang terjadi. Para pemimpin pemerintahan dari 5 negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina sepakat membentuk ASEAN pada tahun 1967. Dengan berdirinya ASEAN, meskipun beberapa konflik masih terjadi pada beberapa negara anggota khususnya di perbatasan, konflik berkepanjangan dan perang skala luas dapat dicegah.

Setelah 40 tahun berdiri, ASEAN kemudian berevolusi menjadi "kerjasama yang berbasis hukum" dari bentuk kerjasama yang tidak mengikat. Para kepala pemerintahan memulai membahas suatu payung hukum yang mengatur dengan jelas institusional ASEAN sebagai entitas legal. Tahun 2007 menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi negara-negara anggota ASEAN, ditandai dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura. Pemimpin ASEAN juga menyepakati ASEAN Vision 2020 bahwa visi negara-negara anggota bersama untuk *outward looking*, hidup dalam damai, stabilitas dan kemakmuran, dalam sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli. Dengan modalitas ini, ASEAN akan menjadi komunitas yang terintegrasi di seluruh aspek pada tahun 2015 (Gambar 1).



Gambar 1. Tahun-tahun penting MEA

Arti penting kerjasama ekonomi ASEAN

Kerjasama ASEAN telah berkembang tidak hanya sebatas menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan. Aspek pembangunan ekonomi kemudian menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota. Secara umum, negara-negara anggota masih dihadapkan pada kenyataan kemiskinan yang masif. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ASEAN memulai kerjasama di bidang liberalisasi perdagangan pada tahun 1977. Pada tahun 1992, *Common Effective Preferential Tariff - ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) disepakati. Sejak itu, kerjasama ekonomi telah bergerak maju di bidang perdagangan jasa, perjanjian investasi, fasilitasi perdagangan dan bidang-bidang kerjasama ekonomi lainnya. Negara-negara anggota juga memulai menuju integrasi dalam ASEAN yang dituangkan dalam *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*. Proses integrasi tersebut dipertegas melalui kesepakatan pembentukan komunitas ASEAN yang tertuang pada ASEAN Vision 2020. Salah satu pilar Komunitas ASEAN yang disepakati adalah *ASEAN Economic Community (AEC)*.

Proses pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tertuang pada *ASEAN Economic Blueprint 2015*. MEA akan mempunyai karakteristik sebagai satu komunitas ekonomi dengan karakteristik sebagai berikut: (a) satu pasar dan satu basis produksi, (b) wilayah ekonomi yang sangat

kompetitif, (c) wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan (d) wilayah terintegrasi ke dalam ekonomi global. Secara ringkas cetak biru ekonomi ASEAN, cakupan kerjasama ini dirancang untuk menstandarisasi kualifikasi profesional; konsultasi intensif dalam bidang ekonomi makro dan kebijakan keuangan; meningkatkan pembiayaan dan perdagangan; membangun infrastruktur dan konektivitas komunikasi; mengembangkan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri antara anggota ASEAN dengan mendorong keunggulan negara anggota; dan meningkatkan partisipasi sektor swasta untuk pembentukan MEA¹. Singkatnya, MEA akan memungkinkan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal antara anggota ASEAN, sehingga akan mengurangi jumlah kemiskinan.

Beberapa peneliti menyampaikan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui keterbukaan perdagangan (*trade openness*). Konsep awal yang disampaikan Adam Smith adalah *absolute advantage theory*. Teori ini menekankan bahwa komoditas unggulan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal melalui perdagangan internasional. Transaksi komoditas unggulan dan membatasi perdagangan internasional sudah tidak lagi menarik untuk dilaksanakan di berbagai negara pada era modern saat ini. Di era industrialisasi dunia, David Ricardo menyampaikan bahwa efisiensi dalam produksi merupakan keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara. Konsep yang disebut *comparative advantage theory* ini dapat terwujud apabila biaya produksi rendah akan menghasilkan harga produksi yang lebih murah. Negara-negara yang terbuka dari segi ekonomi mempunyai tujuan untuk menyerap faktor-faktor produksi yang lebih murah. Dalam konteks ASEAN, kerjasama ekonomi tidak hanya membuka perdagangan bebas semata namun juga mendorong bebasnya pergerakan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam (*resources*) yang lebih murah. Persaingan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN dilaksanakan dalam koridor yang sehat dan saling mendukung, sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan semangat solidaritas untuk kesejahteraan kawasan.

Selama tahun 1960-an untuk tahun 1990-an, beberapa negara anggota ASEAN mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam penelitian Bank Dunia, John Page (1994) menyebutkan bahwa Malaysia, Indonesia dan Thailand sebagai "*ASEAN Miracle*". Ketiganya dikategorikan sebagai ekonomi industri baru dan disetarakan dengan Hong Kong, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Ketiga negara memiliki kesamaan dengan lima negara lain di era tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Kesamaan yang paling signifikan adalah pertumbuhan ekonomi

¹ -----, 2007. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: the ASEAN Secretariat.

yang pesat dan berkelanjutan. Pada periode ini, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) di Thailand, Malaysia, Indonesia masing-masing mencapai 7,7%, 6,8% dan 6,2%. Pertumbuhan yang luar biasa terjadi di Indonesia pada tahun 1968 dengan kebijakan membuka perekonomian dan mampu meningkatkan pertumbuhan sekitar 12% setelah hanya mencapai 1% pada tahun 1967. Indonesia berubah menjadi eksportir minyak mentah dan mampu menarik lebih banyak investasi sejak saat itu. Van Der Eng (2006) menyoroti rezim baru liberalisasi perdagangan di Indonesia. BUMN Pertamina memperoleh keuntungan yang tinggi, sehingga pendapatan pemerintah dapat digunakan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan bagi warga negara. Kinerja ekspor secara bertahap meningkat dan terus tumbuh sekitar rata-rata 7%. Kondisi ini mampu mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Negara anggota ASEAN lainnya seperti Lao PDR, Filipina, dan Vietnam juga tumbuh meskipun tidak terlalu tinggi dengan nilai mencapai 4,5%, 4,2% dan 4,6% masing-masing antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1990. Negara-negara ini masih menerapkan perekonomian yang tertutup pada periode tersebut.

Dalam hal tataran praktis, keterbukaan ekonomi di ASEAN juga telah mendorong reformasi ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi, lebih transparan, dan profesional agar menjadi lebih kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan reformasi kebijakan perdagangan Vietnam dengan lebih terbuka pada periode 1990 hingga 1997. Melalui reformasi Doi Moi, Vietnam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya salah satu *best economic performances* di Asia Tenggara. GDP Vietnam telah meningkat drastis dari US\$13.1 miliar menjadi untuk US\$99.1 miliar. Pertumbuhan cepat ini disebabkan industri manufaktur yang berkembang pesat di Vietnam. Memasuki era millenium, Kamboja juga ikut mereformasi kebijakan ekonomi, sehingga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit. Data World Bank menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kamboja tercatat dua digit dengan 10,3%, 13,2%, 10,7%, 10,2% pada tahun 2004 hingga tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi Kamboja rata-rata dalam dekade terakhir adalah sebesar 7,9%.

Perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN didorong dengan industrialisasi ekonomi. Industri telah mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mayoritas industri di negara anggota ASEAN merupakan *labor-intensive* sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan².

² Wiguna, Candra. *The Impact of Trade Openness on Poverty Reduction: Case Study of ASEAN*. 30 September 2014. University of Birmingham, Inggris.

Sektor tenaga kerja dalam MEA

Pada konteks kerjasama ekonomi ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN akan memudahkan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal antara anggota. Khusus arus tenaga kerja, masyarakat ekonomi ASEAN mendorong pelaku profesional untuk dapat berpartisipasi mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di kawasan. Tenaga kerja profesional di ASEAN difokuskan pada 8 jenis pekerjaan, yaitu di sektor dokter, perawat, dokter gigi, arsitek, akuntan, insinyur, surveyor, dan tenaga pariwisata. Dari data tenaga kerja di ASEAN, komposisi total delapan sektor profesional tersebut hanya sekitar 2 persen dari total tenaga kerja ASEAN yang berkisar 300 juta tenaga kerja. Tenaga kerja di ASEAN saat ini masih didominasi oleh sektor *unskilled* dan *low-skilled labor*.

Delapan profesi tersebut tertuang dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). MRA memuat standarisasi kompetensi tenaga kerja profesional yang diterima oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga memudahkan para pekerja melintas batas mengisi peluang pekerjaan di dalam kawasan. Pembahasan MRA pada masing-masing tenaga kerja telah dimulai sejak 1 dekade yang lalu. Dimulai pada tahun 2005, asosiasi profesional dan pemerintah membahas sektor *engineering* yang kemudian diikuti dengan 7 sektor lainnya. MRA dianggap penting dalam upaya mendorong kemudahan arus mobilisasi tenaga kerja profesional. Namun demikian, pada kenyataannya pembahasan MRA untuk masing-masing sektor, *progress*-nya masih berbeda-beda. Sektor insinyur dan arsitektur telah menghasilkan standar kompetensi termasuk sistem registrasi di skala regional. Untuk sektor tenaga survei atau surveyor, *framework* untuk kualifikasi profesional telah disepakati pada tahun 2007. Akan tetapi, kerangka kerja belum dijabarkan secara detail dan lebih operasional akibat masih terdapatnya perbedaan persepsi di masing-masing negara. Pembahasan MRA untuk sektor perawat, dokter dan dokter gigi belum menghasilkan kemajuan yang signifikan. Sektor medis belum berhasil menghasilkan standar yang dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Masing-masing negara masih berpedoman pada ketentuan dan standar di masing-masing peraturan nasional. Pada umumnya, negara-negara anggota masih membatasi tenaga kerja asing di bidang kesehatan. Lain halnya dengan MRA di sektor pariwisata. Sektor ini cukup menjanjikan mengingat perkembangan yang sangat progresif dibandingkan sektor tenaga kerja yang lainnya. MRA sektor tenaga kerja pariwisata bahkan akan mendirikan sekretariat di Jakarta yang direncanakan pada tahun 2016.

Sektor tenaga insinyur dan arsitektur belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh praktisi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan data yang ada, baru sekitar 1.400 tenaga insinyur yang terdaftar dan terstandarisasi

dengan ketentuan kompetensi yang diatur dalam MRA. Bahkan untuk tenaga arsitektur, jumlahnya jauh lebih sedikit dari tenaga insinyur. Tumbuhnya infrastruktur dan industrialisasi di kawasan Asia Tenggara, tidak disertai dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sektor tenaga kerja khususnya tenaga insinyur dan arsitektur³.

Terwujudnya MEA 2015 dan jalan menuju 2025

Hampir satu dekade negara anggota melakukan persiapan panjang, ASEAN tiba pada persiapan akhir sebelum terbentuknya masyarakat ASEAN di tahun 2015. Sepanjang tahun 2015, masing-masing negara anggota mempersiapkan seluruh kelengkapan payung hukum dan menyelesaikan parameter-parameter yang tertuang pada Cetak Biru ASEAN sebagai satu masyarakat ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur bulan November 2015, secara keseluruhan, tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 dilaporkan telah mencapai 97,6 persen. Secara spesifik, tingkat implementasi pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN adalah 100%, pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN 92,7%, dan pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 100%. Pada KTT ASEAN ke-27, para pemimpin ASEAN menyambut baik capaian seluruh pilar komunitas ASEAN. Para pemimpin ASEAN menyepakati *2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community*. Melalui deklarasi ini, *milestone* penting ASEAN menuju kawasan yang terintegrasi tercapai sebagai suatu Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) termasuk masyarakat ekonomi ASEAN.

Dengan berlakunya masyarakat eASEAN maka ASEAN tumbuh menjadi satu basis produksi dengan mengutamakan keunggulan dari masing-masing negara anggota yang pada akhirnya akan meningkatkan kawasan yang kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang adil dan terintegrasi dengan dunia global. Sebagai suatu entitas tunggal, ASEAN akan menjadi *the 7th largest economy* di dunia setelah Amerika, China, Jepang, Jerman, Perancis dan Inggris dan *the 3th largest economy* di Asia. Secara kolektif, ASEAN memiliki nilai pasar sebesar US\$ 2,6 triliun. Diproyeksikan pada tahun 2050, ASEAN akan menjadi *the 4th largest economy*. Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 - 2013 rata-rata berada di angka 5.1 persen. Pertumbuhannya tertinggi ke tiga setelah China dengan 10% dan India sebesar 7%⁴. ASEAN memiliki pasar yang besar dengan jumlah populasi sebesar 622 juta orang. Dari populasi tersebut,

³ Faisal, Mohammad. *AEC and Congested Labor Mobility*. Halaman 7. Jakarta Post, 18 Januari 2016.

⁴ <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know>

tenaga kerja mencapai 300 Juta orang dari 10 negara ASEAN. ASEAN menjadi *the 3th largest labor force* di dunia setelah China dan India⁵. Tantangan yang dimiliki adalah baru sekitar 2 persen sektor tenaga kerja profesional yang dimiliki oleh ASEAN. Untuk mengkapitalisasi potensi ASEAN, negara-negara anggota harus mengembangkan *human capitals* dan kemampuan tenaga kerja. Untuk Indonesia sendiri, akan mengalami kekurangan pasokan tenaga kerja yang terampil mencapai 9 Juta orang pada tahun 2030⁶. Hal ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga profesional. Tantangan ASEAN sebagai komunitas ke depan adalah memanfaatkan potensi kolektif khususnya di sektor ekonomi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai berlaku sejak Januari 2016. Entitas sebagai satu komunitas telah menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang memiliki *leverages* dengan keunggulannya dan memiliki daya tarik ekonomi yang sangat menarik bagi dunia usaha internasional. ASEAN memiliki posisi yang kuat dalam memainkan peran dalam tataran ekonomi global. Meskipun dihadapkan pada kondisi melemahnya ekonomi dunia yang terjadi saat ini, ASEAN masih dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hal ini ditandai dengan tingginya ketertarikan kawasan lainnya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sebut saja Amerika Serikat, Uni Eropa dan kerjasama dengan organisasi internasional dalam konteks *Asia Pacific Economic Cooperation, G20 Summit* serta upaya pembentukan *the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dengan memperluas kerjasama ASEAN dengan 10 negara mitra wicara.

ASEAN tidak berhenti dengan telah terbentuknya komunitas dan perlu untuk terus mengembangkan kerjasama untuk kesejahteraan kawasan. Selain itu, ASEAN masih memiliki pekerjaan rumah menyelesaikan parameter yang belum rampung pada tahun lalu diantaranya meliputi pelaksanaan *ASEAN Wide Self-Certification system, ASEAN Trade Repository (ATR), ASEAN Single Window (ASW)*. Aspek tenaga kerja juga harus ditingkatkan dalam tataran yang lebih praktis untuk kemudahan tenaga kerja melintas batas di kawasan ASEAN. Negara anggota ASEAN juga telah menyiapkan kerangka kerja untuk 10 tahun ke depan yang tertuang dalam *ASEAN Economic Blueprint 2025*. Melalui Cetak Biru yang baru, MEA akan diperkuat hingga tahun 2025. Visi MEA pada tahun 2025 adalah untuk mencapai 5 karakteristik; (i) ekonomi yang lebih terintegrasi dan kohesif, (ii) ASEAN yang dinamis, kompetitif dan

⁵ *Keynote speech: ASEAN Integration and the Private Sector - Stephen P. Groff* diekstrak dari <http://www.adb.org/news/speeches/keynote-speech-asean-integration-and-private-sector-stephen-p-groff>

⁶ <http://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific/the-archipelago-economy>

inovatif, (iii) peningkatan konektifitas dan kerjasama sektoral, (iv) komunitas yang tangguh, inklusif, *people oriented*, dan *people centered*, (iv) ASEAN yang mengglobal⁷.

⁷ <http://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC.pdf>

III. PERAN STRATEGIS MEA BAGI INDONESIA DAN KAWASAN

Kekuatan Ekonomi ASEAN di Tengah Pusaran Krisis Global

Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dari Uni Eropa dan total GDP mencapai USD 2.4 triliun (atau sekitar 30% dari GDP China),⁸ ASEAN diprediksi akan memegang peran penting dalam percaturan ekonomi global di masa depan. Selain itu, ASEAN yang dikenal juga sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling *vibrant* di dunia diharapkan oleh banyak pihak dapat menjadi kekuatan penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, baik secara ekonomi, maupun secara politik dan strategik.

Dengan segala keunggulan dan harapan yang disematkan kepada ASEAN tersebut, tidak mengherankan jika banyak orang berharap bahwa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2015, akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menggandakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas regional dan memastikan terbentuknya identitas tunggal (*single identity*) di kawasan.

Secara makro, tingginya pertumbuhan ekonomi dan nilai perdagangan, terutama perdagangan intra-ASEAN akan sangat mempengaruhi posisi dan daya tawar ASEAN dalam percaturan politik-ekonomi global. Masalah perdagangan intra-ASEAN misalnya, perlu mendapat perhatian secara serius, karena angka perdagangan intra-ASEAN yang tinggi, bukan hanya akan menyejahterakan rakyat ASEAN, tetapi juga akan menjadikan kawasan tersebut lebih *resilient* dan 'tahan banting' dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global.

Lantas, bagaimana gambaran perdagangan intra-kawasan ASEAN saat ini? Meski dalam *trend* peningkatan, harus diakui bahwa angka perdagangan di dalam dan antar sesama anggota ASEAN masih terbilang rendah, yaitu hanya sekitar 24,2% dari total perdagangan negara-negara ASEAN.⁹ Hal ini bermakna, ketergantungan negara-

⁸ Vinayak HV, Fraser Thompson, and Oliver Tonby, *Understanding ASEAN: Seven Things You Need To Know*, sebagaimana dikutip dari <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know>, 22 Maret 2016.

⁹ ASEAN Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen <http://katadata.co.id/berita/2015/03/02/asean-targetkan-pertumbuhan-ekonomi-51-persen#sthash.r1ruFyD5.dpbs>, 22 Maret 2016.

negara anggota ASEAN kepada negara-negara non ASEAN, masih sangat tinggi. Negara-negara seperti China, Jepang dan Amerika Serikat sampai saat ini masih menjadi *partner* dagang terbesar dan terpenting bagi negara-negara ASEAN.¹⁰ Kondisi tersebut menjadikan perekonomian di kawasan ASEAN akan sangat sulit untuk tidak terpengaruh oleh situasi ekonomi global.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi di ASEAN saat terjadi krisis global.¹¹

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN

NEGARA	1997-2009		2010-2013		2010	2011	2012	2013	Q1 2014
	Era Krisis Asia	Era Tumbuh Stabil	Era Krisis Global						
Brunel Darussalam	1,25	2,24	-1,85	2,60	2,20	1,60	1,80	Indikator terancam	
Kamboja	8,50	9,93	3,40	6,10	7,10	7,20	7,30	Indikator terancam	
Indonesia	-6,15	5,04	5,30	6,20	6,50	6,20	5,78	5,21	
Laos	4,25	6,75	7,65	8,10	8,00	8,10	8,00	Indikator terancam	
Malaysia	-0,65	5,50	1,65	7,10	5,10	5,60	6,00	6,20	
Myanmar	8,35	12,88	4,35	5,30	5,40	6,30	6,50	Indikator terancam	
Filipina	1,25	4,89	2,65	7,60	3,90	6,50	7,20	5,70	
Singapura	2,05	6,36	0,50	14,80	5,10	1,20	3,70	4,90	
Thailand	-3,05	5,05	0,10	7,80	-0,10	6,40	2,90	-2,10	
Vietnam	5,30	7,64	5,80	6,80	5,9	5,00	5,42	4,89	
ASEAN	-1,90	5,56	3,85	8,30	4,90	5,20	5,10	Indikator terancam	

Sumber: IMF, CEIC (2014)

Usaha-usaha untuk mengurangi dampak buruk krisis global terhadap perekonomian di kawasan ASEAN harus dilakukan secara simultan. Selain dengan meningkatkan nilai perdagangan, terutama perdagangan intra-ASEAN, pemberlakuan MEA juga harus menjadi titik awal bagi dimulainya pembangunan pada sektor-sektor yang selama ini menguasai hajat hidup orang banyak dan menyerap tenaga kerja (padat karya) seperti sektor infrastruktur dan konektivitas, pasar modal, penerbangan, perbankan, kesehatan, serta *power* dan *utilities*.¹² Sektor-sektor ini secara makro akan menjadikan konsumsi domestik meningkat dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan ASEAN pada kondisi perekonomian di kawasan lain.

¹⁰ Dr. Frank Frost, *ASEAN and regional cooperation: recent developments and Australia's interests*, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ASEAN#_Toc370112415

¹¹ *Macroeconomic Dashboard Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FIB) UGM, ASEAN: Tantangan Tekanan Ekonomi Global dan Instabilitas Nasional Menuju AEC 2015* <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/asean-tantangan-tekanan-ekonomi-global-dan-instabilitas-nasional-menuju-aec-2015/>

¹² *CIMB ASEAN Research Institute, 6 Sektor Ini Harus Dijaga agar ASEAN Lolos dari Krisis Global*, <http://www.cariasean.org/news/6-sektor-ini-harus-dijaga-agar-asean-lolos-dari-krisis-global/>, 19 Maret 2016.

Selain itu, dalam upaya untuk menjadikan MEA yang *resilient* namun tetap inklusif, negara-negara anggota ASEAN juga harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan mengupayakan program-program peningkatan kapasitas dan transfer teknologi di negara-negara kurang berkembang di kawasan ASEAN. Selain itu, sumber daya domestik harus lebih diupayakan dalam rangka memenuhi rantai pasokan regional, mendorong inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing, serta untuk mendiversifikasi perdagangan regional dan kerja sama ekonomi ('*Go Local, Go Regional*').¹³

Dalam jangka panjang, pilihan untuk meningkatkan perdagangan, khususnya di internal ASEAN, bukan hanya bertujuan untuk menjadikan kawasan ini semakin tahan banting (*resilient*) di tengah krisis global, tetapi juga diharapkan dapat memiliki dampak politik dan geo-strategis yang signifikan. Dengan MEA yang kuat dan inklusif, akan menaikkan daya tawar ASEAN secara politik dan strategik ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Selain itu, dalam konteks stabilitas di kawasan, MEA yang kuat, kohesif dan *vibrant* dapat berkontribusi dalam mengurangi ketegangan dan kecurigaan di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri.

Integrasi Ekonomi Kawasan sebagai Alat Pendorong Stabilitas Politik

Sebagaimana dijelaskan di atas, niat awal pembentukan MEA adalah untuk meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan pasar tunggal di kawasan. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan dengan melakukan liberalisasi pergerakan barang, jasa, modal, tenaga kerja terampil dan investasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Meski dilatarbelakangi motif ekonomi yang kuat, pemberlakuan MEA sesungguhnya juga diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* yang lebih luas, terutama di bidang politik-keamanan. Belajar dari apa yang terjadi di Uni Eropa, integrasi ekonomi di kawasan, ternyata telah memberikan efek positif terhadap stabilitas kawasan. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan untuk melihat pemberlakuan MEA dalam kerangka yang lebih luas, misalnya, dengan memosisikan MEA sebagai 'pelumas' sehingga dapat menjadikan mesin politik-keamanan di kawasan tetap dingin dan stabil.

¹³ Dra. Hj. SB. Wiryanti Sukamdani, CHA, Pernyataan pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Ke-36, Kuala Lumpur – Malaysia, 6-12 September 2016.

Mengurangi tensi ketegangan

Saat ini, ASEAN dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling stabil di dunia. Namun demikian, jika kita telisik lebih jauh, disparitas dan kepentingan politik di antara negara-negara ASEAN sangat beragam. Kamboja dan Thailand misalnya, memiliki sengketa perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear yang nyaris berujung pada konflik bersenjata.¹⁴ Demikian juga, antara Indonesia dengan Malaysia yang beberapa kali terlibat perselisihan tajam, baik akibat perlakuan buruk yang diterima Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, maupun karena masalah perbatasan.

Selain di internal ASEAN, perbedaan pandangan juga terekspresikan dari tidak samanya pendekatan negara-negara ASEAN dalam menyikapi isu kawasan. Dalam isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) misalnya, terlihat hanya Philipina dan Vietnam yang secara tegas menyuarakan protes atas sikap agresif Tiongkok di LTS. Sementara negara-negara ASEAN lain, entah karena tidak terkait langsung dengan LTS atau karena demi menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, cenderung bersikap 'pasif'.

Di tengah perbedaan pandangan/pendekatan tersebut, pemberlakuan MEA diharapkan dapat mengurangi tensi ketegangan dan kecurigaan di kawasan. Kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sebagaimana juga terjadi di Uni Eropa, dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada negara-negara anggota ASEAN untuk membangun kepercayaan dan mengurangi saling curiga satu sama lain.

Meningkatkan daya tawar ASEAN

Dalam sengketa LTS, beberapa kali dunia dikejutkan oleh provokasi Tiongkok yang hampir berujung pada konflik terbuka dengan negara anggota ASEAN, seperti Viet Nam.¹⁵

Sebagai negara kaya baru, Tiongkok kini telah berubah menjadi *super-power*, baik secara ekonomi maupun politik-militer. Dengan kekuatan militernya yang semakin tangguh, Tiongkok kini memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi, antara lain ditunjukkan dengan sikap yang agresif dalam konflik LTS. Provokasi-provokasi tersebut tentunya tidak

¹⁴ Walter Woon "Dispute Settlement the ASEAN Way" (Working Paper), Center for International Law, National University of Singapore, 2011, hal 15-30.

¹⁵ The Wall Street Journal, Vietnam Adds Military Muscle as South China Sea Tensions Escalate, <http://www.wsj.com/articles/vietnam-adds-military-muscle-as-south-china-sea-tensions-escalate-1456095603>

lepas dari perasaan 'di atas angin' Tiongkok *vis a vis* negara-negara ASEAN. Sebagaimana dijelaskan di atas, negeri tirai bambu tersebut adalah *trading partner* terbesar bagi hampir semua negara-negara anggota ASEAN.

Di tengah perkembangan tersebut, menjadi sangat '*timely*' bagi ASEAN untuk mulai membangun kekuatan ekonomi tunggal di kawasan. Pengalaman sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan hanya dapat mensejahterakan masyarakat di kawasan, tetapi juga dapat meningkatkan *leverage* kawasan tersebut ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar lain di dunia.

Tentu bukan hal mudah bagi ASEAN untuk menjadi kekuatan penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan besar dunia tersebut. Beberapa tantangan seperti stabilitas nasional negara-negara ASEAN yang belum terjaga serta adanya perbedaan orientasi politik luar negeri di antara negara-negara ASEAN, dipastikan akan menghambat pembentukan komunitas tunggal di kawasan.¹⁶ Pada titik tersebut, integrasi ekonomi yang masif diharapkan akan membuka jalan bagi kompromi dan kohesi politik yang lebih intensif di antara negara-negara anggota ASEAN.

Metamorfosa yang terjadi di Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa kerjasama ekonomi yang erat di antara negara-negara Eropa, bukan hanya dapat meningkatkan kesejahteraan warga Uni Eropa, tetapi juga, secara strategis dapat mencegah konflik terbuka di antara negara-negara Uni Eropa sendiri. Terbukti setelah pembentukan Uni Eropa, tidak terjadi lagi perang atau konflik bersenjata dengan skala luas yang melibatkan negara-negara anggota Uni Eropa.

MEA sebagai alat rekayasa sosial

Merujuk pada model kerjasama kawasan di Uni Eropa, hal lain yang perlu dicatat dari proses integrasi ekonomi di ASEAN adalah bahwa MEA dapat menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang efektif dalam pembentukan masyarakat yang lebih demokratis dan beradab. Dengan kata lain, MEA dengan segala peraturan teknisnya dapat melempangkan jalan bagi ASEAN untuk mewujudkan cita-cita sebagai

¹⁶ Ketergantungan negara-negara ASEAN yang sangat besar terhadap Tiongkok, bukan hanya berpengaruh dalam proses integrasi ekonomi, tetapi juga berimplikasi secara politik dan strategis. Dalam pertemuan *ASEAN Defense Ministers Plus Eight* (ADMM Plus) yang diselenggarakan pada bulan November 2015 di Kuala Lumpur misalnya, pertemuan gagal menghasilkan dokumen yang penting, karena perbedaan pandangan di kalangan negara-negara ASEAN tentang perlu tidaknya memasukan pasal tentang kecaman terhadap tindakan agresif Tiongkok di LTS.

kawasan madani, yang lebih demokratis, taat hukum (*rule of law*), transparan, anti-korupsi serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Di level teknis, semakin banyaknya instrumen hukum/perjanjian yang harus ditandatangani pemerintah dalam rangka memberlakukan MEA, dalam jangka panjang akan dapat memaksa negara-negara ASEAN untuk melakukan deregulasi peraturan internalnya sekaligus melakukan reformasi tata kelola pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara anggota ASEAN sesuai dengan standar-standar yang telah disepakati bersama.

Dengan kata lain, salah satu *multiplier effect* lain yang sangat penting dari pemberlakuan MEA adalah bahwa dalam jangka panjang integrasi ekonomi kawasan ini diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di kawasan, tetapi juga dapat membantu mewujudkan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang lebih stabil, demokratis dan beradab.

Identitas Tunggal

Salah satu pekerjaan rumah paling penting dalam pembangunan masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) adalah keharusan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan kerjasama kawasan tersebut sehingga lebih berorientasi kepada masyarakat (*people-oriented*). Hanya melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, organisasi ini akan dapat dirasakan peran dan manfaatnya.¹⁷

Pada titik ini, MEA sebagai salah satu pilar yang paling maju dalam kerjasama ASEAN, dapat menjadi instrumen yang sangat penting, terutama dalam membantu pembentukan identitas tunggal di kawasan. MEA dengan salah satu agendanya yaitu memfasilitasi pergerakan barang, jasa dan tenaga terampil (*skilled labour*) di antara negara-negara anggota ASEAN, akan dapat berkontribusi secara massif dalam menciptakan *single identity* untuk masyarakat ASEAN.

Pergerakan tenaga terampil misalnya, akan menjadi modal penting bagi negara-negara ASEAN untuk membentuk identitas kawasan. Sebagaimana diketahui, pembangunan identitas tunggal di kawasan, bukan hanya dapat terjadi karena kesamaan minat budaya atau bahasa, tetapi juga dapat tercipta karena ada kepentingan dan motif ekonomi

¹⁷ Iwan Suyudhie Amri, Bahan Presentasi: Menyambut Komunitas ASEAN 2015, Kementerian Luar Negeri 2015.

yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan *single identity* peran dan keberadaan MEA tidak dapat dinafikan.

IV. PERAN STRATEGIS SDM DI ERA MEA

Dari Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif

Konsekuensi logis terbukanya akses pasar di era MEA adalah spesialisasi yang dilakukan masing-masing negara di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Untuk sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif, terdapat biaya penyesuaian (*adjustment costs*) yang harus ditanggung baik sebagai peredam dampak (*cushion*) maupun sebagai biaya struktural untuk berpindah ke sektor yang lebih memiliki keunggulan komparatif. *Adjustment cost* akibat pembukaan pasar domestik selalu menjadi perdebatan politik yang sengit. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan harus mengantisipasi dan mengelola hal ini dengan baik.

Meskipun pendekatan komparatif dapat menjelaskan manfaat MEA bagi seluruh negara anggotanya, terdapat pendekatan lain yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat mengoptimalkan kesempatan yang ada. Pendekatan tersebut adalah pendekatan keunggulan kompetitif. Pendekatan kompetitif fokus pada cara suatu organisasi bisnis atau negara untuk menciptakan perbedaan (*differentiation*) dalam proses produksi barang/jasa sehingga menjadi lebih kompetitif dibanding perusahaan/negara pesaing.

Pendekatan komparatif lebih menekankan pada *factor endowments* dimana untuk Indonesia berbentuk sumber daya alam yang melimpah dan penyediaan tenaga kerja yang besar. Indonesia tentu tidak akan berpuas diri hanya menjadi negara pengeksport bahan mentah (*raw material*) dan industri-industri dasar dan padat karya (*primary and labour-intensive industries*). Nilai tukar relatif (*terms of trade*) bahan mentah terhadap produk teknologi dan jasa akan menurun dalam jangka panjang. Apalagi selama dekade terakhir, nilai komoditas cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini dapat berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan khususnya bagi negara-negara yang sangat tergantung pada ekspor komoditas.

Namun bukan berarti Indonesia harus meninggalkan sektor berbasis sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dan kemudian justru bersaing di sektor-sektor lain yang tidak unggul. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah (*value added*) pada sektor ekstraktif - sumber daya alam. Nilai tambah dapat dilakukan melalui hilirisasi industri ekstraktif dengan penguatan pada sisi teknologi dan inovasi.

Melalui penambahan nilai tersebut, Indonesia dapat meningkatkan besaran ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Mengikuti Tahapan Pembangunan

Ekonomi Rostow, penambahan nilai melalui investasi di sektor-sektor unggulan dapat menjadi pendorong ekonomi nasional menuju Tahap kedewasaan (*drive to maturity*) dan akhirnya menuju tahap konsumsi tinggi (*high mass consumption*).

Dengan demikian, ide dasar dari proses hilirisasi dan penambahan nilai industri ekstraktif adalah meningkatkan keunggulan kompetitif dengan tetap didasarkan pada *endowments factor* yang dimiliki Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara pengekspor terbesar minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) sebesar 33 juta metrik ton per tahun, mengalahkan Malaysia yang hanya sebesar 19,5 juta metrik ton per tahun.¹⁸ Namun Indonesia kalah jauh dibandingkan Malaysia dalam produk turunan CPO dalam bentuk *oleo-chemical industry*. Indonesia hanya menguasai pangsa pasar *oleo-chemical* global sebesar 12%, dibandingkan Malaysia sebesar 18,6%. Padahal nilai tambah yang dihasilkan *oleo-chemical industry* mencapai 40% dari nilai CPO maupun PKO (*palm kernel oil*).¹⁹

Peningkatan *Value-Added* dalam *Global Value Chains*

Peran penting penambahan nilai dalam rantai proses produksi semakin menguat dalam era globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi serta didukung hambatan artifisial perdagangan yang semakin menurun baik berupa tarif maupun non-tarif telah membuat *multi-national corporations* (MNCs) memiliki keleluasaan untuk memecah rantai produksi barang/jasa ke berbagai negara sebagai upaya mengefisienkan proses produksi.

Untuk meningkatkan efisiensi, MNCs akan memecah proses riset, proses desain, proses pembuatan bagian-bagian (*parts*) suatu produk, proses penggabungan (*assembly*) dan proses *marketing* di berbagai negara. Proses dalam rantai produksi yang bersifat padat karya (*labour intensive*) akan dialihkan pada negara-negara yang upah buruhnya relatif rendah. Sedangkan rantai produksi yang lebih rumit (*sophisticated*) akan dialihkan negara dengan tenaga kerja Terampil yang tinggi. Tren *Global Value Chains* ini telah menciptakan kesempatan bagi negara berkembang seperti Indonesia dan ASEAN untuk turut serta di dalamnya.

Peran *Global Value Chains* dalam proses pembangunan negara berkembang telah banyak dibahas. *United Nations Conference on Trade*

¹⁸ World Palm Oil Production 2015/2016. www.worldpalmoilproduction.com.

¹⁹ Market Intelligence Report (2009). "Oleo-Chemical Industry in Indonesia Still Attractive". Indonesian Commercial Newsletter (ICN)

and Development (UNCTAD) dalam *World Investment Report 2013*²⁰ menegaskan bahwa proses nilai tambah sebagai bagian dari *Global Value Chains* berkontribusi sebesar 30% dari GDP negara berkembang, dibanding 18% untuk negara maju. UNCTAD juga menyebutkan bahwa negara berkembang yang paling banyak terlibat dalam rantai produksi *Global Value Chains* akan mengalami pertumbuhan GDP per kapita yang lebih kuat.

Global Value Chains juga menciptakan kesempatan alih teknologi meskipun hal ini tidak terjadi secara otomatis. Proses pembuatan bagian-bagian suatu produk bermuatan teknologi tinggi dapat mendorong kemampuan rekayasa di dalam negeri. Namun tentu proses rekayasa ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja terampil. MNCs juga tidak akan berminat merelokasi rantai produksi yang bersifat *sophisticated* ke Indonesia jika ketersediaan tenaga kerja terampil yang berkualitas tidak memadai.

Dalam konteks MEA *vis-a-vis* ekonomi global, capaian proses liberalisasi MEA dimana tingkat tarif antar negara anggota sudah mencapai 0% untuk hampir seluruh produk dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi MNCs untuk merelokasi sebagian proses produksinya ke negara-negara ASEAN. Sedangkan dalam konteks Indonesia *vis-a-vis* negara MEA lainnya, Indonesia harus melakukan reposisi dan *upgrading* dari negara penyuplai bahan baku dan proses *assembly* ke rantai produksi yang lebih *sophisticated* dan bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ASEAN, proses *assembly* untuk barang-barang sederhana akan lebih cenderung dilakukan negara CMLV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) yang mempunyai upah relatif rendah, sedangkan Indonesia dapat melakukan bagian riset, desain maupun proses *assembly* dan produksi barang/jasa yang lebih bermuatan teknologi tinggi dan inovasi.

Dari Tenaga Kerja Tidak Terampil Menuju Terampil

Proses hilirisasi, penambahan nilai maupun *upgrading* dalam *Global Value Chain* tidak semudah membalikkan telapak tangan. Proses-proses tersebut memerlukan investasi yang besar dan bersifat jangka menengah dan panjang. Teknologi dan inovasi hanya dapat dihasilkan melalui SDM yang berkualitas. Dan SDM yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan yang berkualitas pula.

²⁰ United Nations Conference on Trade and Development (2013). *Global Value Chains: Investment And Trade For Development*. World Investment Report

Strategi yang pernah diterapkan Indonesia untuk mendorong investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) dengan menjual upah buruh yang rendah sudah tidak dapat lagi digunakan. Dalam ASEAN sendiri, negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) dapat menawarkan upah buruh yang relatif lebih rendah dibanding Indonesia. Pada tahun 2013, upah minimum di Indonesia adalah US\$ 226,50 per bulan (Jakarta), sedangkan Vietnam hanya US\$ 112,68 (Hanoi, Ho Chi Minh City) dan Laos sebesar US\$ 78,15. Sedangkan Myanmar dan Kamboja belum memiliki penetapan UMR namun besaran upah negara-negara tersebut juga jauh di bawah Indonesia.²¹ Sudah saatnya Indonesia mendorong FDI yang lebih berbasis pada *endowments factor* yang ada dengan fokus pada upaya peningkatan nilai tambah teknologi dan inovasi. Namun tentu strategi ini hanya akan berhasil ketika ketersediaan tenaga terampil berkualitas sudah memadai.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan merupakan proses yang instan. Investasi di bidang *human capital* memang merupakan investasi yang mahal dan bersifat jangka menengah dan panjang. Idealnya investasi di bidang *human capital* ini dilakukan jauh sebelum Indonesia memasuki MEA pada tahun 2015.

Banyak yang belum menyadari bahwa pembentukan MEA merupakan proses yang panjang. MEA sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1977 melalui *ASEAN Preferential Trading Arrangements* kemudian diikuti *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* pada tahun 1993. Pada saat tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerjanya termasuk memperbaiki kualitas lembaga pendidikan. Namun saat tersebut Indonesia belum menempatkan peningkatan kualitas sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat Konsitusi baru dapat dipenuhi pada tahun 2009. Hanya berselang 6 tahun sebelum pemberlakuan MEA.

Dalam konteks liberalisasi sektor jasa khususnya mobilitas pekerja lintas batas, saat ini pembukaan pasar MEA memang masih terbatas pada pembukaan pasar *mode 3 commercial presence (contractual service supplier dan intra corporate transferee)* dan *mode 4 movement of natural person* untuk 8 jenis profesi (insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat). Untuk pembukaan pasar *mode 4*, Indonesia tampak belum dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal. Hal ini selain antara lain

²¹ ASEAN Briefing (2013). "Minimum Wage Levels Across ASEAN".
<http://www.aseanbriefing.com>. Diunduh pada 2016-03-19

dikarenakan kebutuhan yang masih tinggi di dalam negeri untuk profesi-profesi tersebut, namun dapat juga dikarenakan daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah di pasar tenaga kerja ASEAN. Kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu kelemahan yang menonjol bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN lain yang memang menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari seperti Singapura, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia perlu segera mendidik tenaga kerja terampil dan profesional yang siap bersaing di pasar MEA. Persiapan tersebut tidak terbatas pada 8 jenis profesi yang telah terbuka, namun untuk semua jenis ketrampilan dan profesi yang ada karena ASEAN Blueprint 2025 memang mengamankan fasilitasi untuk semua jenis tenaga terampil dan profesional.

Hal lain yang perlu disadari dalam liberalisasi sektor jasa ini adalah bahwa MEA tidak membuka pasar bagi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Konsekuensi dari hal ini adalah jika tenaga kerja tidak terampil di Indonesia tidak melakukan proses *upgrading* atau peningkatan kemampuan, maka mereka hanya akan menjadi penonton dari pembukaan pasar tenaga kerja dan tidak akan dapat meraih manfaat dari MEA secara optimal. Sudah saatnya Indonesia fokus pada pengiriman dan penempatan tenaga kerja terampil di negara-negara ASEAN. Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada penempatan tenaga kerja informal PLRT. Untuk itu, beberapa hal yang dapat diupayakan antara lain adalah: meningkatkan investasi di sektor pendidikan; memberikan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau; memberikan kemudahan bagi tenaga kerja tidak Terampil dalam meningkatkan kemampuannya (*access to education*); menyediakan pendidikan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja terampil siap kerja.

Studi Komparasi: Kesiapan Malaysia dalam MEA

Posisi ekonomi Malaysia dalam ASEAN

Malaysia menempati urutan ketiga di ASEAN jika dilihat dari sisi jumlah penduduk dan tingkat GDP. Namun Malaysia menempati urutan kedua jika dilihat dari tingkat GDP per kapita. Nilai GDP per kapita Malaysia mencapai US\$ 10.073, sekitar tiga kali lipat dari nilai GDP per kapita Indonesia yaitu US\$ 3.416.²²

Total perdagangan Malaysia tahun 2014 mencapai US\$ 443.209 juta dimana Singapura menjadi negara tujuan ekspor utama, sedang RRT

²² IMF (2015). "World Economic Outlook Database October 2015"

sebagai negara utama sumber barang impor. Indonesia merupakan negara tujuan ekspor kesembilan bagi Malaysia dan negara urutan keenam untuk negara sumber barang impor²³.

Malaysia memiliki lebih dari 1000 perusahaan yang telah menembus pasar negara-negara ASEAN. Perusahaan-perusahaan Malaysia tersebut paling banyak masuk ke pasar Thailand (250), disusul Indonesia (200) dan Singapura (150).²⁴ Perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai bidang seperti antara lain perbankan, garmen, perkebunan sawit, telekomunikasi, migas, manufaktur, otomotif, maskapai penerbangan, dan konstruksi.



Gambar 2. Penetrasi perusahaan Malaysia di pasar ASEAN

Upaya Malaysia dalam peningkatan SDM

Malaysia telah menyusun *Malaysian Education Blueprint 2013-2025*. Tujuan dari blueprint tersebut adalah menyiapkan generasi muda Malaysia agar dapat mengatasi tantangan persaingan abad ke-21. Malaysia telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan investasi di bidang pendidikan. Pada tahun 2008, Malaysia telah mengalokasikan

²³ Asian Development Bank (2015). *Key Indicators for Asia and the Pacific 2015*; 46 Edition.

²⁴ Mohamed, Dato' Sri Mustapa (2014). "Malaysia and EAC".

16% anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan.²⁵ Pada saat yang sama, Indonesia baru mengalokasikan anggaran 9% dari APBN.

Terdapat 11 strategi perubahan yang diterapkan Malaysia untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Strategi tersebut antara lain: menyediakan pendidikan berstandar internasional, meningkatkan kemampuan bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Melayu), dan memanfaatkan teknologi informasi.

Akses pendidikan untuk seluruh populasi juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1970, terdapat 37% penduduk Malaysia yang tidak menikmati bangku pendidikan. Pada tahun 2010, angka tersebut dapat ditekan menjadi 10%. Pada tahun 1970, terdapat 19% penduduk yang menamatkan pendidikan menengah, sedang pada tahun 2010, angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi 61%.

Secara keseluruhan, tampak pendidikan Malaysia telah mengantisipasi dengan cukup baik era perdagangan bebas MEA.

Peluang tenaga kerja profesional

Jumlah penduduk Malaysia yang relatif kecil (30,26 juta jiwa) membuat permintaan tenaga kerja di Malaysia cukup tinggi khususnya untuk sektor-sektor non-profesional seperti pekerja konstruksi, pekerja perkebunan, pekerja pertanian dan pekerja domestik PLRT. Namun memang sektor-sektor ini tidak termasuk dalam skema pembukaan pasar MEA. Pembukaan pasar sektor ini lebih bersifat unilateral dengan berbagai persyaratan yang ditentukan Pemerintah Malaysia. Meskipun tidak masuk dalam skema MEA, kesempatan pasar tenaga kerja trampil ini kiranya perlu dimanfaatkan secara maksimal, kecuali untuk sektor informal PLRT dimana Pemerintah Indonesia memang sudah merencanakan untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja PLRT.

Dari delapan jenis profesi yang dibuka dalam MEA, terdapat beberapa kesempatan yang terbuka dikarenakan tingkat permintaan yang cukup tinggi di Malaysia antara lain insinyur, dokter gigi dan praktisi medis. Saat ini sudah banyak insinyur Indonesia yang bekerja di Malaysia terutama di bidang migas. Malaysia juga saat ini tengah mengembangkan sektor *health tourism* sehingga memerlukan tenaga medis yang cukup banyak. Kesempatan ini kiranya perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia.

²⁵ Malaysia Education Blueprint 2013-2025

V. INDONESIA DAN MEA: PELUANG, RESIKO DAN TANTANGAN

Posisi Ekonomi Indonesia dalam ASEAN

Secara umum, kawasan ASEAN menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir, sekaligus menghadapi masalah semakin dalamnya kesenjangan ekonomi. Indonesia merupakan negara anggota yang menyumbang *share* lebih dari sepertiga perekonomian ASEAN.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, *trend* impor Indonesia dari kawasan ASEAN dalam periode lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan peningkatan sebesar 4,70%. Sedangkan *trend* ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN dalam periode yang sama meningkat sebanyak 0,66%. Nilai impor non migas Indonesia dari kawasan ASEAN pada periode Januari-Oktober 2015 adalah US\$ 21,43 miliar. Nilai ini menurun 14,95% dari periode Januari-Oktober 2014 sebesar US\$ 25,20 miliar. Sementara itu nilai ekspor non migas Indonesia ke ASEAN pada periode Januari-Oktober 2015 adalah sebesar US\$ 23,03 miliar, menurun 4,73% dari periode Januari-Oktober 2014 yang tercatat sebesar US\$ 24,18 miliar.

Berdasarkan data ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan non migas Indonesia dengan ASEAN untuk periode Januari-Oktober 2015 mengalami surplus sebesar US\$ 1,60 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 257,13% dari nilai defisit periode Januari-Oktober 2014 sebesar US\$ 1,02 miliar.

Neraca perdagangan non migas Indonesia dengan ASEAN pada periode 2013 dan 2014 berturut-turut mengalami defisit yang cukup signifikan, sebelum pulih kembali pada periode 2015. Pada periode 2013, defisit mencapai US\$ 234,64 juta yang kemudian menjadi US\$ 889,62 juta pada periode 2014.

The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* menempatkan Indonesia dalam peringkat 37 dari 140 negara. WEF memberikan pujian bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang mulai menunjukkan hasilnya. WEF juga mencatat bahwa sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan daya saingnya, terutama di bidang infrastruktur dan institusi. Selain itu, sektor kesehatan masyarakat juga perlu mendapat

perhatian dengan adanya penyakit menular dan angka kematian bayi yang tertinggi di luar kawasan Sub Sahara Afrika.

Berdasarkan *Report* tersebut, apabila dibuat perbandingan dengan negara-negara anggota ASEAN, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Nugroho SBM dari Universitas Diponegoro menyatakan bahwa saat ini posisi Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN berada pada level menengah ke bawah.²⁶ Sedangkan dari aspek kemudahan melakukan usaha, World Bank menempatkan Indonesia pada posisi 109 dari 189 negara. Untuk intra ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat 7 dari 10 negara ASEAN.²⁷

Peluang

David Ricardo (1772-1823) berpendapat bahwa sistem perdagangan bebas akan membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, karena mendorong ke arah spesialisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan selanjutnya mengoptimalkan produktivitas. Semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan melalui spesialisasi dan kekayaan global akan meningkat.

Bagi Indonesia, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Semua bentuk penghalang akan dibebaskan dan ada deregulasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Dalam rangka merebut peluang yang ditawarkan MEA, Pemerintah Indonesia mempersiapkan 12 sektor unggulan yang terdiri dari 7 sektor perdagangan dan 5 sektor jasa. Sektor perdagangan meliputi produk berbasis pertanian/argo, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif dan kayu. Sedangkan sektor jasa mencakup perhubungan udara, *e-commerce* atau elektronik ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata dan jasa logistik.

Pada sisi investasi, integrasi MEA akan menciptakan iklim kondusif bagi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

²⁶ Taqiyah, Barratut, *Di ASEAN, posisi Indonesia di level menengah-bawah*, 28 Desember 2015.

²⁷ doingbusiness.org, World Bank, June 2015

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena tersedia banyak lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian/ketrampilan yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi bebas hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Pada bulan Agustus 2014, International Labour Organization (ILO) dan Asian Development Bank (ADB) menerbitkan laporan penelitian bahwa MEA diprediksi menciptakan 14 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup sekitar 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara.²⁸ Dari estimasi tersebut, pada tahap awal sebanyak 1,9 juta lapangan kerja berada di Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat perubahan struktural menuju sektor-sektor dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi.²⁹ Estimasi tersebut hanya mampu menampung 1,3% dari angkatan kerja yang tersedia di Indonesia. Riset tersebut juga memproyeksikan bahwa antara tahun 2010 hingga 2025, pekerjaan yang memerlukan ketrampilan tinggi di Indonesia meningkat sebesar 55,7%, sedangkan lowongan kerja ketrampilan menengah tumbuh sekitar 26,1% dan pekerjaan dengan ketrampilan rendah diperkirakan hanya bertambah 3,2%. Dalam kaitan ini, dengan 254 juta penduduk atau 40,3% jumlah penduduk ASEAN, Indonesia memiliki potensi untuk menyebarkan tenaga kerjanya di seluruh wilayah MEA.

Resiko

Hakekat MEA adalah liberalisasi perdagangan intra ASEAN. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dijamin akan memperoleh akses perdagangan yang bebas hambatan. Namun seiring dengan peluang yang terbentang luas tersebut, juga terdapat resiko yang perlu dikelola sehingga tidak menghambat tercapainya tujuan positif MEA.

Liberalisasi menghasilkan dampak yang berbeda-beda bagi setiap negara. Bagi Indonesia, resiko tersebut antara lain terkait dengan homogenitas komoditi yang diperjualbelikan. Contoh komoditi yang ketat kompetisinya adalah produk pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan

²⁸ www.theglobal-review.com

²⁹ MEA 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama, ADB-ILO, Agustus 2014.

barang elektronik.³⁰ Hampir semua negara ASEAN juga menghasilkan dan memasarkan komoditi yang sama, dan harga jualnya pun sangat kompetitif dibandingkan dengan harga jual produk lokal. Situasi ini dapat mengancam produk industri dalam negeri yang kurang mampu bersaing dengan produk impor. Apabila berkelanjutan, neraca perdagangan akan terancam defisit.

Iklim yang kondusif bagi masuknya FDI juga dapat memunculkan *exploitation risk*.³¹ Tingkat regulasi peraturan di Indonesia dinilai masih kurang mengikat sehingga berpotensi terjadi tindakan eksploitasi secara masif terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa kebijakan justru mendorong ke arah terjadinya eksploitasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sering dianggap sebagai penghambat investasi, sehingga cenderung diabaikan.³² Sementara itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal seolah membuka jalan bagi investor asing untuk menguasai perekonomian Indonesia, termasuk penguasaan sumber daya alam.³³

Dalam segi ketenagakerjaan, selain peluang untuk penyerapan tenaga kerja yang sangat luas terbentang, terdapat resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dari sisi pendidikan dan produktivitas, SDM Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Daya saing yang kurang memadai tersebut adalah akibat dari rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2013, rendahnya kualitas terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang jumlahnya mencapai 52 juta atau 46,95%. Sebagian besar dari jumlah tersebut bekerja di sektor informal, dan sebagian lagi pengangguran. Pada Agustus 2014, tercatat lebih dari 900 ribu anak-anak usia SD sudah putus sekolah.³⁴ Kelompok ini rentan menjadi pekerja anak dan kemungkinan besar tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Apabila tenaga kerja Indonesia sulit bersaing, maka lapangan kerja untuk tenaga kerja

³⁰ Baskoro, <http://www.crmsindonesia.org>

³¹ Ibid.

³² "70 persen kerusakan lingkungan akibat operasi tambang", Kompas 28 September 2012.

³³ "Pertambangan Freeport dan Kerusakan Lingkungan", apitmoti.blogspot.my

³⁴ MEA 2015: Mengelola integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama, ADB-ILO, Op. Cit.

terdidik yang ada di Indonesia dikhawatirkan akan diisi oleh tenaga kerja asing.

Dengan hadirnya MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan resiko-resiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membenahi infrastruktur terkait untuk memperbaiki daya saing Indonesia, sekaligus mengantisipasi dan meminimalisir resiko-resiko yang muncul.

Tantangan

Bayu Krisnamurthi dalam suatu wawancara, menegaskan bahwa tantangan terbesar MEA adalah bagaimana Indonesia harus "menyerang", bukan "bertahan".³⁵ Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki modal yang paling lengkap antara lain jumlah penduduk terbanyak sebagai sumber tenaga kerja dan karakter Indonesia yang sangat heterogen sehingga membuat pasar Indonesia semakin menarik. Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Iklim investasi cukup kondusif dan merupakan basis produksi yang kompetitif. Indonesia juga relatif mapan secara sosial politik sekaligus merupakan negara demokrasi yang besar.

Dalam kaitan dengan MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan dua strategi besar yaitu strategi menyerang (*offensive*) untuk menggebrak pasar ASEAN dan strategi bertahan (*defensive*) untuk pasar dalam negeri. Komoditi utama yang didorong untuk memasuki MEA adalah komoditi industri argo seperti kakao, karet dan minyak kelapa sawit atau komoditi yang berbasis sumber daya alam dan telah ditingkatkan nilainya, sehingga tidak berupa bahan mentah; berbagai barang konsumsi (*consumer products*) dan ekonomi kreatif yang saat ini semakin maju. Sebagai ilustrasi, di seluruh dunia jumlah aktor dalam industri ini tidak lebih dari 5%. Untuk Indonesia dengan penduduk sekitar 250 juta, maka terdapat sekitar 10-15 juta orang yang berkibrah di sektor ini. Oleh karena itu, Pemerintah akan menyiapkan infrastruktur terkait yang memadai untuk memberdayakan sektor ekonomi kreatif ini. Sedangkan komoditi yang didorong untuk pasar lokal, utamanya adalah barang-barang konsumsi seperti otomotif, elektronik, semen, pakaian, alas kaki, makanan/minuman dan furniture.

Namun demikian, sebagian kalangan berpandangan bahwa "keunggulan" dan "modal" yang telah dimiliki Indonesia tersebut hanya

³⁵ SWA.co.id

sebagai "pemanis" untuk menjual Indonesia ke pasar dan pemodal internasional.³⁶ Kalangan yang pesimis ini mengingatkan bahwa faktanya, daya saing industri dan ekonomi Indonesia masih di bawah negara-negara besar ASEAN lainnya. Pengembangan industri nasional masih terkendala sejumlah faktor seperti dukungan infrastruktur yang kurang memadai, biaya logistik yang tinggi, persoalan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan upah minimum, masalah ketenagakerjaan, masih adanya pungli sampai birokrasi perizinan yang berbelit-belit.³⁷

Hasil survei Litbang *Kompas* bulan Oktober 2015 tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan pasar bebas ASEAN mengungkapkan kekhawatiran publik terhadap kesepakatan MEA. Hampir separuh responden yang terjaring survei tatap muka ini menyatakan MEA lebih merugikan Indonesia. Persepsi negatif muncul mungkin karena minimnya sosialisasi tentang pasar bebas ASEAN kepada masyarakat, sebagaimana diakui oleh sebagian besar responden yang tidak mengetahui soal MEA. Sebagian besar responden khawatir pemberlakuan MEA akan berefek negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Kualitas barang dan SDM kalah bersaing, perekonomian bakal lesu, dan pengangguran meningkat.

Namun demikian, Pemerintah cukup optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia untuk berpacu dalam MEA. Apabila dibuat sistem skor untuk mengukur kesiapan Indonesia, maka seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, persentase kesiapan Indonesia mencapai 94,1%.³⁸ Dalam realitanya, komunitas MEA sebenarnya telah dibangun secara bertahap sejak diinisiasi lebih dari satu dekade lalu, dan semua negara termasuk Indonesia telah bersama-sama berkembang sejalan dengan disepakatinya MEA.

Dengan terbentuknya MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan bila MEA telah diimplementasikan. Tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan homogenitas komoditi yang diperjualbelikan. Contoh komoditi yang ketat kompetisinya adalah produk pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan barang elektronik. Hampir semua negara ASEAN juga menghasilkan dan memasarkan komoditi yang sama, dan harga jualnya pun sangat

³⁶ Abeng, Emil, ASEAN Economic Community 2015, Posisi Indonesia?

³⁷ *Harian Ekonomi Neraca*

³⁸ Presiden: Harus siap hadapi MEA, www.republika.co.id, 23 November 2015.

kompetitif dibandingkan dengan harga jual produk lokal. Situasi ini dapat mengancam produk industri dalam negeri yang kurang mampu bersaing dengan produk impor.

Setelah 70 tahun merdeka pun, belum seluruh rakyat Indonesia menikmati kesejahteraan sosial yang adil sebagaimana cita-cita Konstitusi 1945. Masih ada sebagian rakyat yang menjalani kehidupan pra sejahtera. Masih terdapat kesenjangan antara satu kawasan dengan kawasan lain di wilayah Indonesia. Kompetisi dalam MEA dapat mempertajam disparitas tersebut. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu menyusun strategi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisir disparitas pembangunan, sehingga kesejahteraan yang diperjuangkan dalam MEA dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Dalam sebuah kesempatan saat KTT ke-27 ASEAN pada November 2015 di Kuala Lumpur, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia harus pandai-pandai memanfaatkan peluang era MEA. Tantangan Indonesia bukan sekadar mengharapkan sesuatu yang positif dari MEA, tetapi harus secara pro aktif merebut peluang tersebut. Caranya antara lain dengan melakukan efisiensi di segala bidang, meningkatkan daya saing sampai dengan merevisi regulasi yang menghambat. Presiden telah meminta agar dilakukan identifikasi produk-produk yang memiliki daya saing, dan selanjutnya didorong untuk memasuki pasar negara-negara lain.

Untuk meningkatkan daya saing, menurut WEF terdapat 12 indikator yang harus diupayakan yaitu institusi, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kemudahan usaha dan inovasi. Ke-12 pilar inilah yang merupakan pekerjaan rumah dan tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan MEA.

Bagaimana meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah adalah pekerjaan rumah yang amat penting, karena SDM unggul dan kompeten merupakan salah satu faktor utama yang akan membuat Indonesia memenangkan peluang dalam MEA. Selain itu, infrastruktur dan konektivitas serta tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik juga menjadi faktor penentu.

VI. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS SDM INDONESIA

Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan era perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN. Perdagangan bebas tersebut meliputi aliran bebas barang (*free flow of goods*), aliran bebas pelayanan (*free flow of services*), aliran bebas investasi (*free flow of investment*), aliran bebas modal (*free flow of capital*) dan aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labor*). Dalam aspek ketenagakerjaan, sejauh mana Indonesia siap dalam menghadapi persaingan tenaga kerja terampil?, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bab ini mendiskusikan tentang kondisi SDM Indonesia dan upaya peningkatan kapasitasnya.

Berdasarkan data hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2015 dapat diketahui jumlah angkatan kerja Indonesia yang bekerja pada tahun 2007 sebanyak 99.930.217 orang dan meningkat 14,71% menjadi 114.628.026 orang pada tahun 2014. Sebanyak 28,7% angkatan kerja adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang merupakan proporsi terbesar diikuti lulusan SMA (umum) 16,2% dan tidak tamat SD 13,8%. Bila dijumlahkan maka angkatan kerja lulusan SMA ke bawah menempati proporsi yang sangat besar yaitu 90,1%. Sementara itu angkatan kerja dengan kualifikasi lulusan diploma hanya 2,6% dan lulusan universitas 7,2% (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah angkatan kerja yang bekerja berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja Bekerja			
	2007	%	2014	%
Tidak/belum pernah sekolah	5.394.670	5,4	5.187.494	4,5
Tidak/belum tamat SD	13.013.110	13	15.815.487	13,8
SD	37.961.150	37,9	32.952.556	28,7
SMP	18.830.204	18,8	20.350.838	17,7
SMA (Umum)	12.747.029	12,7	18.579.737	16,2
SMA (Kejuruan)	5.788.656	5,8	10.520.757	9,2
Diploma I/II/III/Akademi	2.597.593	2,6	2.956.780	2,6
Universitas	3.597.805	3,6	8.264.377	7,2
Jumlah/Total	99.930.217	100	114.628.026	100

Data diolah dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus (2015) (Kemenko Perekonomian 2015)

Data tersebut menunjukkan performa angkatan kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi kompetensi yang rendah. Dengan demikian pemerintah menghadapi tantangan yang besar untuk meningkatkan kualifikasi SDM sehingga mampu bersaing di era MEA. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, angka partisipasi pendidikan dasar memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2007 angka partisipasi pendidikan SD telah mencapai 95%, dan diharapkan terus

meningkat hingga 100%. Grafik pada Gambar 3 menunjukkan perkembangan jumlah siswa SD, SMA dan SMK yang memiliki kecenderungan meningkat pesat dari tahun 1945 hingga 2014. Namun demikian jumlah siswa SD dari tahun 1990 hingga 2014 tetap (*stagnant*) dan menurun untuk siswa SMK.



Gambar 3. Perkembangan jumlah siswa SD, SMA dan SMK tahun 1945-2014 (Baswedan 2014)

Rendahnya jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi adalah sebuah tantangan untuk terus ditingkatkan jumlahnya. Berbagai kendala dihadapi perguruan tinggi pada saat ini, diantaranya yaitu rendahnya kualitas perguruan tinggi, SDM perguruan tinggi yang belum berkualitas, penelitian dan pengembangan yang belum produktif, inovasi yang masih rendah, dan lulusan perguruan tinggi yang belum terampil. Kondisi ini telah berakibat kepada daya saing pendidikan tinggi Indonesia yang masih rendah. Indeks pendidikan tinggi Indonesia tahun 2014 masih berada pada peringkat 61 dan indeks inovasi pada peringkat 31 dunia (Gambar 4).

Dalam menghadapi tantangan rendahnya kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja Indonesia, maka diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk meningkatkan kualitas SDM saat ini. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia. Untuk memasuki pasar kerja ASEAN, maka diperlukan pengakuan kualifikasi SDM Indonesia yang dapat ditempuh melalui

pelatihan kerja. Terkait dengan hal ini pemerintah telah menyiapkan regulasi yang diatur dalam PP No. 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional dan Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Disamping itu juga telah disiapkan kelembagaan pendukung bagi penyelenggaraan latihan kerja serta sistem penjaminan mutunya.

Selain diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pengakuan kualifikasinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka kompetensi bahasa Inggris menjadi sangat krusial dalam menghadapi persaingan global di era MEA. Hasil hasil survei lembaga Bahasa Inggris EF *English Proficiency Index* (EF EPI) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia khususnya orang dewasa berada di urutan ke-32 dari 70 negara. Di peringkat Asia, Indonesia berada di urutan ke-8 dengan skor 52,9%, dimana urutan pertama Singapura, kemudian Malaysia dan India.

Dalam menghadapi tantangan MEA Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia turut serta mengupayakan peningkatan kualifikasi SDM Indonesia di Malaysia melalui berbagai program yang dilaksanakan secara reguler. Banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang mencapai lebih dari 3 juta orang dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sebagian besar rendah, diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan (*upgrading*) kompetensinya. Program yang dilakukan oleh KBRI meliputi:



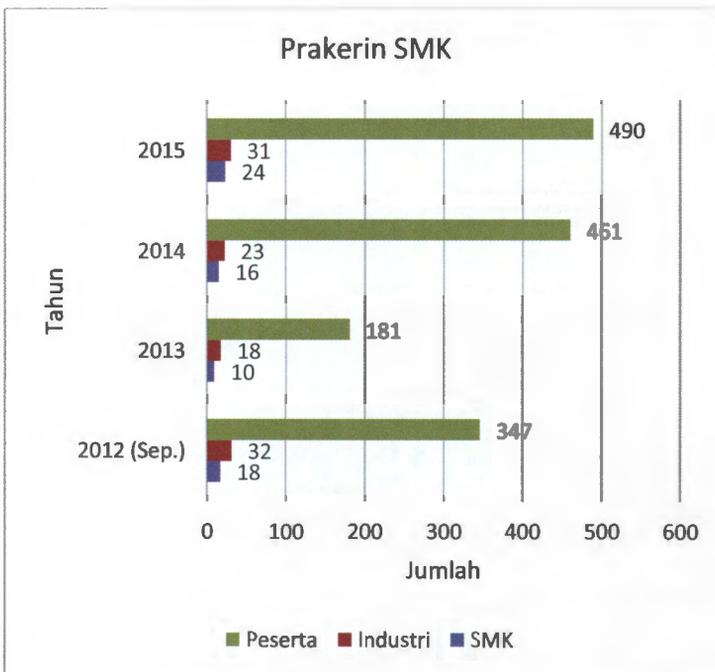
Gambar 4. Tantangan pendidikan tinggi Indonesia (Na'im 2015)

Edukasi untuk bangsa, yaitu sebuah program pelatihan bagi TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang dimulai sejak tahun 2011. Program ini setiap tahun diselenggarakan oleh KBRI Kuala

Lumpur bekerjasama dengan LKBN Antara, diikuti tidak kurang sebanyak 100 orang peserta. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta meliputi pelatihan komputer, bahasa Inggris, dan kewirausahaan.

Penyelenggaraan program Paket A, B dan C, yaitu program ujian kesetaraan SD, SMP dan SMA yang dilaksanakan oleh Tim Pendidikan Non Formal (PNF) di bawah koordinasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur.

On the job training (praktek kerja industri-Prakerin) siswa SMK Indonesia di Industri Malaysia. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2012 melalui kerjasama antara SMK dengan industri perhotelan, makanan, otomotif, elektronik, dan sebagainya. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. Jumlah peserta Prakerin dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, begitu juga SMK dan industri yang terlibat menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 kegiatan Prakerin diikuti oleh 490 orang peserta dari 24 SMK dengan melibatkan sebanyak 31 industri di Malaysia (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan Prakerin SMK tahun 2012-2015.

Universitas Terbuka (UT), merupakan terobosan UT bekerjasama dengan KBRI Kuala Lumpur untuk membuka layanan pendidikan tinggi jarak jauh bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Layanan pendidikan UT ini menginduk kepada UPBJJ UT Batam dan dibawah koordinasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 720 mahasiswa UT aktif di seluruh Malaysia, meliputi kelompok belajar (Pokjar) Kuala Lumpur sebanyak 385 mahasiswa, Pokjar Penang 127 mahasiswa, Pokjar Johor Bahru 132 mahasiswa dan Pokjar Kota Kinabalu dan Tawau 76 mahasiswa.

VII. PENUTUP

Sebagai penutup dari Orasi Ilmiah ini, berikut ini disampaikan 3 poin penting terkait dengan upaya peningkatan SDM Indonesia menghadapi MEA.

- 1) Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN tidak bisa menghindar dari era globalisasi dunia maupun regional dalam MEA, sehingga MEA menjadi sebuah keharusan dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi (*point of no return*).
- 2) Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik tidak hanya bagi negara-negara ASEAN tetapi juga negara-negara lainnya di dunia. Dengan demikian Indonesia harus mampu menyiapkan diri menghadapi tantangan MEA melalui penyiapan SDM sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga mampu merebut pasar kerja di negara ASEAN lainnya.
- 3) Penyiapan SDM Indonesia perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah dasar dan menengah, APK perguruan tinggi; pelatihan kerja; peningkatan kemampuan bahasa Inggris; serta penyelenggaraan sertifikasi profesi sebagai upaya pengakuan terhadap kompetensi SDM Indonesia.

Daftar Pustaka

ASEAN Briefing (2013). "Minimum Wage Levels Across ASEAN". <http://www.aseanbriefing.com>. Diunduh pada 2016-03-19.

Asian Development Bank (2015). Key Indicators for Asia and the Pacific 2015; 46 Edition.

Abeng, Emil (2015). "ASEAN Economic Community 2015, Posisi Indonesia?" emilabeng.com diunduh pada 2016-03-19.

Baswedan, Anis (2014). Gawat darurat pendidikan di Indonesia. Presentasi Mendikbud disampaikan dalam Silaturami Kementerian dengan Kepala Dinas, Jakarta 1 Desember 2014.

Baskoro, Arya (2015). "Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN." crmsindonesia.org diunduh pada 2016-03-19.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian (2015). Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Presentasi disampaikan kepada Kongres PPI Malaysia, UUM Kedah Malaysia, 7 November 2015.

Erianto, Dwi (2015). "Jajak Pendapat: MEA, Antara Peluang dan Ancaman." kompas.com diunduh pada 2016-03-20.

Falvey Rod, Greenaway David and Silva Joana (2010). "Trade Liberalisation and Human Capital Adjustment". *Journal of International Economics*, Volume 81, Issue 2

International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries (1998). "Dealing With Commodity Price Volatility in Developing Countries: A Proposal for A Market-Based Approach". World Bank

IMF (2015). "World Economic Outlook Database October 2015". Diunduh pada 2016-03-19

Ilyas, Maulana Muhammad (2015). "Prospek dan Risiko Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi Indonesia." <https://ideasforaec.wordpress.com> diunduh pada 2016-03-21.

Krugman, Paul (1996). "Ricardo's Difficult Idea". <http://web.mit.edu/krugman/www/ricardo.htm>. Diunduh pada 2016-03-19.

Laporan Penelitian ILO-ADB, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola Integrasi untuk Pekerjaan yang Lebih Baik dan Kesejahteraan Bersama, Agustus 2014.

Market Intelligence Report (2009). "Oleo-Chemical Industry In Indonesia Still Attractive". Indonesian Commercial Newsletter (ICN). Diunduh pada 2016-03-19

Mohamed, Dato' Sri Mustapa (2014). "Malaysia and EAC". www.miti.gov.my/miti/resources/fileupload/Consultation_on_AEC.pdf Diunduh pada 2016-03-19

Na'im, Ainun (2015). Grand design program Kemenristekdikti 2015-2019. Presentasi Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jakarta 5 Agustus 2015.

Porter, Michael E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Simon and Schuster.

"Pertambangan Freeport dan Kerusakan Lingkungan." apitmoti.blogspot.my diunduh pada 2016-03-23.

Pratama, Addien Mirza (2015). "Posisi Indonesia serta Peluang Kedepannya Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015." <https://ideasforaec.wordpress.com> diunduh pada 2016-03-19.

"Presiden: Harus siap hadapi MEA." www.republika.co.id, 23 November 2015 diunduh pada 2016-03-21.

Rostow, W. W. (1962). *The Stages of Economic Growth*. London: Cambridge University Press

United Nations Conference on Trade and Development (2013). *Global Value Chains: Investment And Trade For Development*. World Investment Report.

"70 persen kerusakan lingkungan akibat operasi tambang". kompas.com, 28 September 2012 diunduh pada 2016-03-22.

World Palm Oil Production 2015/2016. www.worldpalmoilproduction.com. Diunduh pada 2016-03-19

Wiguna, Candra. *The Impact of Trade Openness on Poverty Reduction: Case Study of ASEAN*. 30 September 2014. University of Birmingham, Inggris.

Taqiyah, Barratut (2015). "Di ASEAN, posisi Indonesia di level menengah-bawah." lipsus.kontan.co.id diunduh pada 2016-03-19.

RIWAYAT HIDUP

Marsekal TNI (Purn.) Herman Prayitno, S.IP., M.M.

Data Pokok

Nama	: Herman Prayitno, S.IP., MM
Tempat lahir dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 9 Januari 1951
Jabatan	: Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Malaysia
Pangkat Terakhir	: Marsekal TNI (Purnawirawan)
Korps	: Penerbang
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Menikah memiliki 3 anak

Pendidin Umum

1. SMA-B	Lulus 1969
2. Sarjana Ilmu Politik (UT)	Lulus 1996
3. Magister Manajemen (Un. Jayakarta)	Lulus 2001

Pendidikan Pertama/Pendidikan Pengembangan Umum

1. AAU	Lulus 1973
2. Sekkau	Lulus 1982
3. Seskoau	Lulus 1990
4. Sesko Studi Banding di Jerman	Lulus 1993
5. Sesko ABRI	Lulus 1994
6. KSA Lemhannas	Lulus 2000

Pendidikan Militer (Kursus)

1. Sekolah Penerbang	Lulus 1976
2. Kursus Bahasa Inggris	Lulus 1980
3. Sekolah Instruktur Penerbang	Lulus 1982
4. Kursus Manajemen Modern	Lulus 1997

Riwayat Pangkat

1.	01-12-1973	Letnan Dua
2.	01-04-1976	Letnan Satu
3.	01-10-1979	Kapten
4.	01-10-1984	Mayor
5.	01-04-1990	Letnan Kolonel
6.	01-10-1994	Kolonel
7.	01-08-1997	Marsekal Pertama TNI
8.	15-03-2001	Marsekal Muda TNI
9.	10-11-2003	Marsekal Madya TNI
10.	27-02-2006	Marsekal TNI

Riwayat Jabatan

1.	1976	: Penerbang Tempur Taktis OV-10 di Malang
2.	1982	: Instruktur Penerbang di Yogyakarta
3.	1987	: Komandan Pangkalan Rembiga Lombok
4.	1990	: Dosen di Seskoau
5.	1997	: Komandan Pangkalan Adi Soemarmo Solo
6.	1997	: Kepala Dinas Administrasi Personel Mabasau
7.	1999	: Wakil Komandan Seskoau
8.	2001	: Gubernur AAU
9.	2002	: Pangkoopsau I
10.	2003	: Asisten Personel Kasau
11.	2003	: Komandan Sesko TNI
12.	2004	: Wakil Kasau
13.	2006	: Kasau
14.	2006	: Komisaris Utama PTDI
15.	2009	: Komisaris Utama Angkasa Pura II
16.	2012	: Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Malaysia

Seminar-Seminar

Pernah mengikuti seminar-seminar mengenai manajemen di dalam dan di luar negeri.

Tanda Kehormatan

1. Bintang Mahaputra Utama
2. Bintang Dharma
3. Bintang Yudha Dharma Pratama

Duta Besar Herman Prayitno

4. Bintang Kartika Eka Paksi Utama
5. Bintang Jalesena Utama
6. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama,
7. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun,
8. Satyalancana Seroja (Timor Timur)
9. Satyalancana GOM VII (Aceh)
10. Satyalancana GOM IX Raksaka Dharma (Papua)
11. Satyalancana Dwidya Sistha
12. Sayap Penerbangan Kehormat dari Tentera Udara Diraja Malaysia
13. Wing Penerbang dari RSAF (Singapura)
14. Wing Penerbang dari RTAF (Thailand)
15. Honorary PAF Gold Wing dari Philippines Air Force
16. Lencana Juru Terbang Kehormat dari Tentera Udara Diraja Brunei

Data Keluarga

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama Ayah | : Djoko Soehirman (Alm) |
| 2. Nama Ibu | : Isbarini (Alm) |
| 3. Nama Istri | : Ratna Andarwaty |
| 4. Nama Anak | : 1) Marcella Savitri
2) Galih Brahmantyo
3) Aurelia Arta Mesia Hasnah |